

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Suatu daerah dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonomi daerahnya apabila daerah tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakatnya secara merata. Tolak ukur yang dapat menggambarkan pembangunan manusia (upaya peningkatan taraf hidup masyarakat) terkait dengan pertumbuhan ekonomi disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

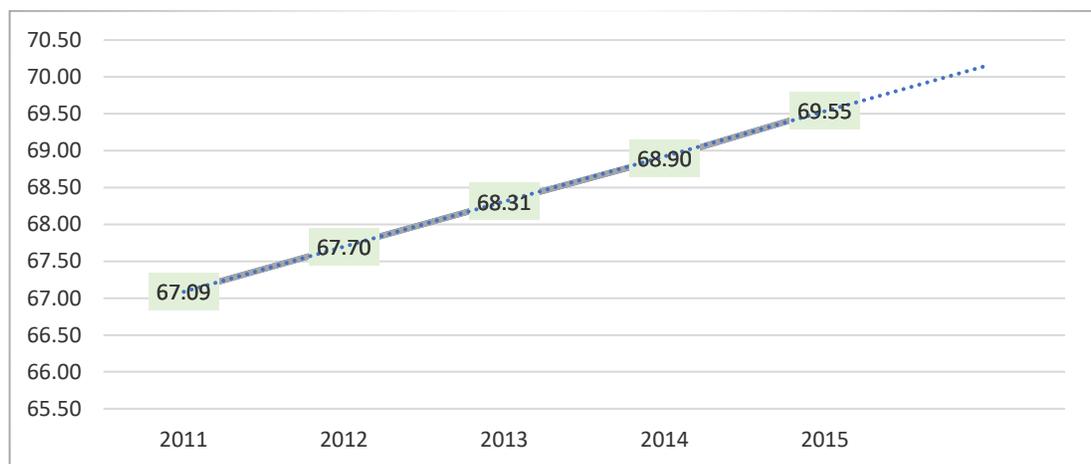
Indeks Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk (Andaiyani, 2012). Kualitas fisik ditunjukkan oleh angka harapan hidup sedangkan, kualitas non fisik ditunjukkan dengan lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek umur. Dalam pembangunan skala nasional Indonesia menitikberatkan pembangunan ekonomi sekaligus dengan pembangunan kualitas manusia. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan persediaan berbagai sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya dalam rangka peningkatan pembangunan manusia.

Kinerja ekonomi dengan hasil yang maksimal juga ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Karena dengan banyaknya sumber daya manusia yang berkualitas tersebut dapat menentukan kemampuan masyarakat dalam

menyerap, mengolah dan mengelola sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun regional.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan target yang paling penting bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan (Pratowo, 2012). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula pembangunan ekonomi yang dapat dicapai khususnya dalam hal pembangunan manusia.

Berdasarkan data menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2011-2015 secara bertahap terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik

### **GAMBAR 1.1**

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2011-2015

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, bahwa pada tahun 2015 nilai Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia meningkat sebesar 69,55. Dalam skala nasional terlihat bahwa IPM di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Namun, dalam skala internasional nilai IPM Indonesia di tahun 2015 turun tiga peringkat dari peringkat 110 pada tahun 2014 menjadi peringkat 113 dari 188 negara di dunia berdasarkan laporan *Human Development Report* tahun 2016.

Beberapa provinsi di Indonesia menjadi penyebab menurunnya IPM Indonesia dalam skala internasional karena nilainya sangat rendah. Kebanyakan Provinsi tersebut berada di kawasan timur Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut adalah provinsi yang termasuk di dalam kawasan timur di Indonesia, yaitu :

**TABEL 1.1**  
IPM Kawasan Timur di Indonesia Tahun 2011-2015

| PROVINSI          | TAHUN |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                   | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Sulawesi Tenggara | 66.52 | 67.07 | 67.92 | 68.49 | 69.15 |
| Gorontalo         | 63.48 | 64.16 | 64.7  | 65.17 | 65.86 |
| NTB               | 62.14 | 62.98 | 63.76 | 64.31 | 65.19 |
| Sulawesi Barat    | 60.63 | 61.01 | 61.53 | 62.24 | 62.96 |
| NTT               | 60.24 | 60.81 | 61.68 | 62.26 | 62.67 |
| Papua Barat       | 59.9  | 60.3  | 60.91 | 61.28 | 61.73 |
| Papua Barat       | 55.01 | 55.55 | 56.25 | 56.75 | 57.25 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkat setiap tahunnya dari tahun 2011-2015 dengan nilai sebesar 62,14 di tahun 2011 dan

nilai sebesar 65,19 di tahun 2015. Namun, pada skala nasional nilai IPM NTB menempati posisi kelima sebagai provinsi yang memiliki nilai IPM terendah di Indonesia.

**TABEL 1.2**  
Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2011-2015

| Tahun | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|-------|------------------------------|
| 2011  | -3,39                        |
| 2012  | -1,54                        |
| 2013  | 5,16                         |
| 2014  | 5,06                         |
| 2015  | 21,24                        |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan hal ini berbanding terbalik dengan keadaan perekonomian NTB yang secara kumulatif mengalami peningkatan sebesar 21,24 persen, yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi NTB merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara provinsi lain di Indonesia.

Hasan (2016) mengatakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi (PDRB) maka semakin tinggi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Nilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah memiliki kontribusi terhadap pembangunan manusia karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan menjamin meningkatnya kapasitas produksi maupun pendapatan melalui tersedianya kesempatan kerja. Dengan tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kenaikan pendapatan yang akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat tersebut. Nilai Indeks Pembangunan Manusia di

Indonesia termasuk dalam kategori IPM menengah ke atas, walaupun pada kenyataannya nilai IPM NTB nilainya kecil secara nasional.

**TABEL 1.3**  
PDRB Nusa Tenggara Barat ADH Konstan 2010 (Ribuan Rupiah)

| NO   | Lapangan Usaha                           | Tahun         |               |               |               |               |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          |
| 1    | Pertanian                                | 15 691 914.20 | 16 407 442.30 | 16 946 742.70 | 17 702 366.10 | 18 924 911.80 |
| 2    | Pertambangan dan Penggalian              | 14 709 393.10 | 10 788 742.10 | 11 254 503.20 | 11 238 697.90 | 23 267 235.10 |
| 3    | Industri Pengolahan                      | 3 277 041.20  | 3 414 873.50  | 3 539 536.80  | 3 658 662.10  | 3 772 631.60  |
| 4    | Listrik, Gas dan Air Bersih              | 38 398.20     | 43 051.10     | 47 750.60     | 66 684.60     | 67 276        |
| 5    | Bangunan,Perdagangan, Hotel dan Restoran | 1 813 371.40  | 1 934 432.80  | 2 086 022.40  | 2 205 657.90  | 2 356 412.70  |
| 6    | Pengangkutan dan Komunikasi              | 1 335 853.40  | 1 447 895.10  | 1 554 874.80  | 1 684 952.80  | 1 825 487.20  |
| 7    | Keuangna, Persewaan dan Jasa             | 1 702 029.90  | 1 928 494.30  | 2 106 190.60  | 2 268 865.20  | 2 480 270.70  |
| 8    | Perusahaan                               | 104 931.40    | 114 698.10    | 122 637.30    | 131 542.30    | 139 118.50    |
| 9    | Jasa-jasa                                | 1 386 241.70  | 1 418 058.90  | 1 532 031.40  | 1 651 964.30  | 1 754 482.70  |
| PDRB |  | 67 379 140.60 | 66 340 812.40 | 69 766 714.40 | 73 372 963.80 | 89 344 577.90 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan lewat PDRB maupun laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Standar hidup masyarakat ditentukan dengan seberapa besar kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan barang dan jasa. Menurut Anggraini dan Lutfi (2013), terdapat keterkaitan dan saling kontribusi satu sama lain antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Pembangunan manusia akan tercapai apabila pertumbuhan ekonomi meningkat. Karena, dengan adanya

pertumbuhan ekonomi akan menjamin meningkatnya kapasitas produktivitas maupun pendapatan melalui tersedianya kesempatan kerja. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu penyumbang sektor pertanian terbesar. Namun, meskipun NTB mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hal tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan manusia belum maksimal dan kualitasnya juga masih sangat rendah apabila dibandingkan negara provinsi lain.

Menurut Sa'diyah (2014), kemampuan keuangan daerah memiliki peranan yang penting dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia melalui kebijakan pemerintah dalam alokasi belanja daerah melalui APBD. Peningkatan realisasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan membantu meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun, pada kenyataannya alokasi pengeluaran pemerintah masih rendah sehingga masalah pembangunan manusia seperti pendidikan yang rendah dan kesehatan yang buruk tidak bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian hal ini akan menyebabkan rendahnya nilai IPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menurut Lanjouw dalam Ginting et al. (2008), pembangunan manusia dapat disebabkan oleh kemiskinan. Awalnya, kemampuan daya beli masyarakat menurun karena rendahnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat sehingga menyebabkan pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat penting bagi pembangunan manusia seperti memperoleh pendidikan dan kesehatan yang baik tidak mampu terpenuhi. akibatnya, produktifitas akan menurun karena rendahnya pendidikan yang

menyebabkan rendahnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan ilmu pengetahuan yang tinggi serta kesehatan masyarakat yang kurang baik menyebabkan rendahnya harapan hidup masyarakat.

**TABEL 1.4**  
Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2015

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) | Persentase Kemiskinan (%) |
|-------|-------------------------------|---------------------------|
| 2011  | 896.190                       | 19,73                     |
| 2012  | 840.107                       | 18,63                     |
| 2013  | 835.425                       | 17,97                     |
| 2014  | 816.620                       | 17,24                     |
| 2015  | 802.290                       | 17,10                     |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan berturut-turut selama tahun 2011-2015. Namun, sebenarnya dalam tingkat nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki persentase penduduk miskin yang besar hingga tahun 2015 sehingga hal tersebut mempengaruhi proses pembangunan manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan topik pembangunan manusia yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2015”.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat adanya faktor keterbatasan dan banyaknya faktor-faktor yang berhubungan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, maka dirumuskan masalah yang akan diteliti hanya membahas pada :

1. Variabel-variabel yang dianggap berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan.
2. Dalam penelitian ini mengambil rentan tahun antara tahun 2011-2015.
3. Lokasi Penelitian yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota yang meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Bima dan Mataram.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2015.
2. Bagaimana pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2015.

3. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2015.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2015.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2015.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2015.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, dapat dijadikan penelitian yang bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia dan variabel – variabel yang mempengaruhinya.
2. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan referensi untuk penelitian – penelitian sejenis dalam ruang lingkup yang lebih luas.
3. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.